

346-065973

PRA

6



**HUKUM PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT
DALAM HAL PENDIRIAN PERUSAHAAN**

DISAJIKAN OLEH :

Nama : PARAMITA PRANANINGTYAS,SH,LL.M

NIP : 132 056 163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1997

HUKUM PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT

DALAM HAL PENDIRIAN PERUSAHAAN

oleh Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

PENDAHULUAN

Hukum perusahaan Amerika Serikat seperti pada umumnya hukum perusahaan negara-negara lain juga mengatur mengenai pendirian perusahaan. Di dalam peraturan tersebut pasti akan diatur secara rinci proses dan prosedur pendirian suatu perusahaan.

Proses pendirian suatu perusahaan adalah suatu proses yang mudah dan dapat dilakukan oleh seorang Legal Secretary (bagian hukum) yang berkompeten. Salah satu hal pendorong adalah adanya inovasi dalam bidang pengolahan huruf di dunia komputer , yang memungkinkan untuk memproduksi secara massal dokumen-dokumen perusahaan. Telah banyak pariwisata yang menawarkan mengenai journal-journal hukum yang berisi 'peralatan" pendirian perusahaan, yang berbasis pada standar dasar pendirian perusahaan dan produksi massal dari dokumen-dokumen perusahaan. Terdapat dua kerugian dari hal tersebut. Pertama adalah kesulitan yang akan timbul jika seseorang yang tidak menguasai secara mendalam mengenai hukum perusahaan harus berhadapan dengan masalah-masalah yang khas dari suatu usaha. Masalah kedua adalah bahaya massal yang

akan dihadapi sehubungan dengan dipakainya "mesin penetas" dokumen, dokumen-dokumen tersebut mungkin akan dapat dipakai atau cocok untuk masalah pada satu perusahaan tetapi akan tidak cocok jika dipakai untuk perusahaan yang lain di masa yang lain pula. Akan tetapi pada dasarnya proses pendirian suatu perusahaan adalah suatu proses yang mudah dan bersifat rutin dan sama sekali bukan proses yang misterius.

PERMASALAHAN

Permasalahan dari makalah ini adalah proses-proses apa sajakah yang harus dilalui oleh seseorang yang akan mendirikan suatu perusahaan di Amerika Serikat ?

PEMBAHASAN

PEMILIHAN LOKASI PENDIRIAN

Perusahaan yang sudah go publik (bersifat terbuka), yang jaringan operasionalnya meliputi semua negara bagian secara teoritis harus memilih salah satu negara bagian sebagai tempat pendirian perusahaan. Secara umum perusahaan dengan tipe yang demikian akan memilih negara bagian Delaware sebagai lokasi pendirian perusahaan (setelah ini akan disingkat dengan PT).

PT yang bersifat kecil jaringan bisnisnya, yang hanya meliputi satu negara bagian atau secara teoritis mempunyai hak yang sama juga dengan PT terbuka yang dalam hal operasinya, juga memiliki hak untuk memilih lokasi pendiriannya dan hak untuk lokasi operasionalnya. Namun demi alasan praktis PT yang sifatnya kecil tersebut lebih baik memilih lokasi pendirian perusahaan di daerah yurisdiksi operasional PT tersebut. Karena jika memilih untuk mendirikan PT ditempat selain lokasi operasional atau lokasi pusat usaha maka PT tersebut harus menanggung kualifikasi sebagai "PT asing" di negara bagiannya sendiri dan kemudian akan terkena pembebanan pajak berganda dan efek berikutnya adalah dapat digugat di negara bagian yang jauh lokasinya.

Jika memang harus memilih lokasi pendirian perusahaan selain di lokasi operasional PT dan sudah memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi maka negara bagian Delaware adalah pilihan yang populer. Namun kini hampir semua negara bagian telah memperbaharui hukum perusahaan mereka, maka keuntungan pemakaian Delaware sebagai lokasi pendirian perusahaan yang bersifat kecil yang akan beroperasi di tempat lain semakin berkurang, dan kini PT-PT tersebut lebih memilih untuk mendirikan perusahaannya di lokasi dimana operasional PT akan berlangsung.

MEKANISME PENDIRIAN PERUSAHAAN

Mekanisme pendirian PT bervariasi di setiap negara bagian, yang diatur oleh peraturan-peraturan lokal yang lebih detail.

Setiap negara bagian selalu mencantumkan syarat pendaftaran dokumen kepada petugas negara bagian, umumnya adalah Sekretaris Negara Bagian, yang diikuti juga dengan pembayaran fee pendaftaran. Istilah yang dipakai untuk menyebutkan dokumen yang didaftarkan bermacam-macam, antara lain "Akta pendirian perusahaan". "Sertifikat pendirian perusahaan", "Piagam" dan istilah-istilah lainnya.

Pendaftaran tersebut akan dinilai oleh petugas negara bagian, seorang profesional dibidangnya. Jika dokumen disetujui, maka pada saat itulah keberadaan suatu PT sudah resmi dimulai, tanggal dan waktu diterimanya dokumen untuk didaftarkan dapat dipakai sebagai tanggal pendirian / tanggal operasional PT.

Pihak yang berwenang dalam hal pemberian ijin memberikan persetujuannya dalam beberapa langkah, secara tradisional adalah dengan mengeluarkan secara formal "piagam" atau sertifikat pendirian perusahaan dan melekatkannya pada salinan asli atau copy dari dokumen pendaftaran yang asli, atau dapat juga dengan cukup memberikan kwitansi pembayaran biaya / fee pendaftaran. Dokumen pendaftaran dan dokumen pendirian perusahaan yang asli disimpan oleh Sekretaris

Negara Bagian bersama dengan beberapa informasi penting lainnya di dalam komputer yang dapat dibaca (diakses) oleh umum.

Beberapa negara bagian memiliki syarat khusus, sebagai contoh Delaware yang mensyaratkan pendaftaran setempat pada county (daerah setingkat kecamatan) dimana kantor pusat perusahaan berada selain dari pendaftaran di tingkat negara bagian. [Del.Code Ann.Tit. 8 section 103 (c) (5)].

Contoh lain adalah negara bagian Arizona yang mensyaratkan akta pendirian perusahaan dipublikasikan melalui harian lokal dimana perusahaan akan beroperasi selama 3 kali dalam tenggang waktu 60 hari. Beberapa negara bagian lain mensyaratkan perusahaan untuk juga melakukan pendaftaran pada setiap county dimana perusahaan tersebut sekiranya akan melangsungkan bisnisnya. Tetapi pada dasarnya syarat-syarat tambahan ini tidak bermanfaat dan bahkan tidak ada bersifat praktis.

Pendaftaran perusahaan secara lokal juga akan menimbulkan masalah hukum, yaitu mengenai waktu pendirian perusahaan , jika terjadi pengesahan secara bersamaan. Beberapa negara bagian memiliki pemecahan terhadap masalah ini seperti Delaware, perusahaan telah resmi berdiri jika telah diterima dan disahkannya sertifikat pendirian perusahaan oleh Sekretaris Negara Bagian , akan tetapi tidak dapat memenuhi syarat pendaftaran perusahaan secara lokal

dalam periode waktu tertentu, kegagalan ini akan berakibat pada naiknya biaya pendaftaran tetapi tidak berakibat negatif pada keberadaan perusahaan. [Del Code Ann.Tit. 8 section 103 (d)]. Di beberapa negara bagian yang lain keberadaan perusahaan ditentukan oleh sudah atau belum terpenuhinya syarat pendaftaran di semua tingkat dan syarat pencantuman di surat kabar.

PENDIRI PERUSAHAAN

Orang atau sekumpulan orang yang membuat akta pendirian perusahaan disebut sebagai pendiri perusahaan. Jumlah pendiri perusahaan sifatnya bervariasi di setiap negara bagian, namun secara tradisional tiga adalah jumlah yang biasa dipilih ; perkembangan terakhir beberapa negara bagian mensyaratkan hanya seorang pendiri perusahaan. Beberapa negara bagian juga masih menerapkan syarat umur minimum dan syarat kependudukan dalam hal pendirian perusahaan, namun sebagian besar negara bagian sudah mengizinkan pendirian perusahaan oleh siapa saja yang dianggap cakap menurut hukum tanpa ada syarat sebagai penduduk. Secara tradisional, hanya manusia saja yang berhak menjadi pendiri perusahaan, tetapi kini banyak negara bagian yang memperbolehkan subyek hukum lain selain manusia sebagai pendiri perusahaan, contohnya adalah PT bertindak sebagai pendiri perusahaan.

Pengendoran syarat-syarat sebagai pendiri perusahaan berakibat pada semakin kecilnya fungsi dan tugas yang dimiliki pendiri perusahaan. Pendiri perusahaan memiliki variasi tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mereka yang membuat dan mengantar akta pendirian perusahaan kepada Sekretaris Negara Bagian
2. Mereka atau wakilnya yang menerima sertifikat pendirian perusahaan dari Sekretaris Negara Bagian
3. Mereka yang bertugas untuk memenuhi semua syarat organisasi perusahaan dan atau mengundang rapat direksi untuk memenuhi semua syarat organisasi perusahaan.
4. mereka dapat juga secara sukarela membubarkan perusahaan jika perusahaan tidak dapat memulai usahanya atau tidak dapat menerbitkan saham.
5. Mereka dapat mengubah akta pendirian perusahaan dengan kesepakatan bulat jika perusahaan tidak dapat memulai usahanya atau tidak dapat menerbitkan saham.

Secara tradisional pendiri perusahaan berkewajiban memenuhi semua syarat organisasi perusahaan. Namun Model Business Corporation Act telah mengubah pola ini dengan mensyaratkan pencantuman nama-nama direktur perusahaan dalam akta pendirian perusahaan dan merekalah yang bertugas memenuhi semua syarat organisasi perusahaan. Banyak negara bagian yang telah mengikuti pola ini dan kemudian tugas pendiri

perusahaan hanya bersifat seremonial menandatangani akta pendirian perusahaan.

Pasal 2.02 (b) (1) dan 2.05 (a) dari Revised Model Business Corporation Act memberikan pilihan kepada para perusahaan baru tersebut, apakah mereka akan memberikan wewenang kepada pendiri perusahaan untuk melengkapi formalitas perusahaan atau mencantumkan nama direktur-direktur perusahaan dalam akta pendirian dan merekalah nantinya yang akan melengkapi organisasi perusahaan. Kelenturan dari peraturan ini adalah untuk memberikan jalan keluar pada perusahaan yang mengalami kesulitan untuk melengkapinya tanpa banyak menyita waktu dan biaya.

Pada waktu bertindak sebagai pendiri perusahaan, seseorang tidak dapat dituntut atas tindakannya. Alasan inilah yang menyebabkan banyak konsultan hukum / pengacara atau legal sekretarisnya bertindak sebagai pendiri dari suatu perusahaan bahkan sebagai direktur perusahaan atau direktur sementara dari suatu perusahaan. Namun banyak konsultan hukum / pengacara yang menolak untuk bertindak selaku direktur suatu perusahaan kecil atau bertindak dengan terpaksa.

Seorang pendiri perusahaan harus dibedakan dari seorang penanam modal / pemegang saham. Yang terakhir adalah seseorang yang setuju untuk membeli saham suatu perusahaan dengan kata lain adalah seorang investor dan seroang

partisipasi usaha. Dahulu banyak negara bagian yang masih mensyaratkan seorang pendiri perusahaan adalah juga seorang pemegang saham, namun kini syarat tersebut sudah tidak ada lagi.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN SECARA UMUM

Dokumen yang diserahkan kepada Sekretaris Negara Bagian harus wajib memuat informasi-informasi tertentu, yaitu :

1. Nama perusahaan
2. Masa hidup perusahaan (dapat bersifat abadi)
3. Tujuan atau tujuan-tujuan perusahaan, dapat secara umum disebutkan "bertujuan untuk semua usaha yang sah menurut hukum"
4. jumlah saham yang akan diterbitkan, termasuk juga informasi mengenai hak-hak dan keutamaan dari setiap saham tersebut
5. Alamat dari kantor (pusat perusahaan) yang terdaftar dan nama petugas dari kantor terdaftar tersebut
6. Jumlah direktur disertai nama dan alamat anggota dewan direksi
7. Nama dan alamat setiap pendiri perusahaan

Pada waktu penyusunan undang-undang hukum perusahaan yang baru (Revised Model Business Corporation Act) diketahui bahwa setiap perusahaan modern pasti akan memilih jangka

waktu yang abadi sebagai usia perusahaan dan tujuan perusahaan adalah untuk usaha di semua hal yang sah menurut hukum. Dengan tujuan untuk mempermudah akta pendirian perusahaan maka RMBCA (UU PT AS) menetapkan bahwa kedua hal tersebut diatas lah yang dipergunakan kecuali jika perusahaan menginginkan jangka waktu yang lebih pendek dan tujuan usaha yang lebih khusus lagi. Jika perusahaan hanya memiliki satu kelas saham dan hanya dikoordinasikan oleh seorang pendiri perusahaan maka syarat pencantuman nama dan alamat anggota dewan direksi tidak perlu dilakukan.

Suatu perusahaan juga diwajibkan memiliki suatu "hukum" dalam rangka mengendalikan perusahaan yang tidak bertentangan dengan akta pendirian perusahaan. Sebagai contoh adalah tentang pemegang saham mayoritas ditentukan oleh jumlah quorum pemegang saham kecuali ditentukan lain. Aturan lain adalah mengenai hak terdahulu dari pemegang saham untuk memiliki saham atau menentukan jenis saham yang memiliki hak untuk memutuskan . RMBCA dan aturan lainnya yang sejenis tidak menyebutkan tentang hak "opt-in" tetapi menyerahkannya kepada akta pendirian perusahaan.

Perusahaan memiliki hak untuk mengatur intern perusahaannya yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan agar bersifat lebih permanen, lebih sulit untuk diubah dan bersifat mengikat. Hal-hal tersebut dapat juga dicantumkan di dalam anggaran dasar perusahaan. Para hakim dan pengacara

mengharapkan suatu aturan yang penting mengenai hak-hak konsumen juga dapat dicantumkan di dalam akta pendirian perusahaan dan diulang kembali dalam anggaran dasar perusahaan.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : NAMA PERUSAHAAN

Terdapat syarat-syarat minimum untuk nama perusahaan yaitu :

1. Harus terdapat kata-kata yang mencerminkan perusahaan seperti 'corporation', 'company', 'incorporated' termasuk juga singkatannya.
2. Tidak boleh mencantumkan kata-kata yang menggambarkan aktifitas yang dilarang untuk usaha tersebut.
3. Tidak boleh terlalu mirip dengan nama perusahaan lain yang sudah ada di dalam negara bagian yang sama. Nama tersebut harus dapat dibedakan dengan memakai dasar nama-nama yang ada di arsip Sekretaris negara Bagian. Tujuannya untuk mencegah praktek persaingan curang.
4. Jika nama tersebut mirip maka harus ada surat keterangan tidak keberatan dari pemilik nama yang pertama.

Sekretaris Negara Bagian menyimpan arsip nama-nama perusahaan yang dapat dipakai sebagai referensi. Namun pengaturan mengenai kemiripan nama berifat subyektif dari setiap sekretaris negara bagian

Dikenal juga selain nama resmi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan adalah nama tidak resmi perusahaan. Nama tidak resmi perusahaan juga dapat didaftarkan.

Pemberian status untuk nama perusahaan adalah didasarkan pada prinsip siapa yang mengajukan terdahulu, jadi namaperusahaan dapat didaftarkan lebih dulu untuk sementara waktu baru kemudian dokumen yang lain menyusul. Hal ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan asing yang ingin memiliki nama yang khas.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : JANGKA WAKTU

Semua peraturan mengenai hukum bisnis kini memperbolehkan suatu perusahaan untuk memiliki masa hidup usaha yang abadi. Dahulu beberapa peraturan membatasi usia perusahaan hanya sampai 50 tahun atau jangka waktu tertentu yang lain. Peraturan-peraturan semacam tersebut kini tidak dipakai lagi. MBKA (UU PT Amerika Serikat yang lama) mensyaratkan pencantuman usia PT, kemudian digantikan oleh peraturan yang memperbolehkan pencantuman usia Pt yang abadi oleh RMBKA kecuali jika diinginkan lain.

Hal "kecuali diinginkan lain" dinilai tidak bijaksana, karena jika PT mencantumkan jangka waktu tertentu untuk usia PT maka jika jangka waktu tersebut sudah berakhir dan tugas-tugas PT belum selesai maka status PT menjadi tidak jelas.

Dalam hal demikian jalan keluar yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan mengubah akta dan memperpanjang jangka waktu atau menggantinya menjadi bersifat abadi.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : KETENTUAN MENGENAI TUJUAN

Semua negara bagian sekarang mencantumkan dalam undang-undangnya bahwa perusahaan dapat didirikan untuk semua tujuan yang sah menurut hukum. Masih banyak negara bagian yang mensyaratkan pencantuman secara detail tujuan-tujuan perusahaan, namun tetap mengizinkan statemen yang bersifat umum seperti " untuk tujuan bisnis yang umum " atau " untuk bergerak dibidang usaha yang sah menurut hukum ". Hal-hal ini kemudian dadaptasi oelh RMBCA pasal 3.01 yang menyebutkan bahwa semua perusahaan wajib mencantumkan " bertujuan untuk bergerak di bidang usaha yang sah menurut hukum kecuali tujuan yang lebih khusus dicantumkan di dalam akta pendirian perusahaan".

Sejarah perkembangan mengenai tujuan perusahaan adalah sangat menarik karena merupakan gejala yang umu dari perkembangan hukum perusahaan di tingkat negara bagian. Pada abad ke sembilan belas, perusahaan hanya dapat didirikan untuk suatu tujuan khusus dan peraturan-peraturan pada saat itu kebanyakannya mensyaratkan hanya untuk satu jenis tujuan. Peraturan-peraturan tersebut mensyaratkan pencantuman secara detail dari tujuan perusahaan tersebut.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol aktivitas perusahaan secara ketat. Namun kemudian menimbulkan masalah 'ultra vires' dimana suatu perusahaan dituduh melakukan usaha diluar tujuan dan haknya.

Pembaharuan pertama adalah dengan memperbolehkan perusahaan untuk mencantumkan beberapa macam tujuan usaha dan jangka waktu usia perusahaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Masalah yang timbul dari hal ini adalah tidak adanya batasan tentang jumlah tujuan yang dapat dicantumkan oleh satu perusahaan, bahkan dimungkinkan untuk mencantumkan suatu tujuan fiktif. Hal ini sama sekali tidak mendukung perkembangan suatu perusahaan bahkan tidak berdifat informatif.

Langka berikut adalah mengizinkan perusahaan untuk mempergunakan kalimat yang mudah dan bersifat umum seperti "perusahaan ini bergerak di bidang usaha yang sah menurut hukum". Karena hampir semua perusahaan memilih untuk mempergunakan kesempatan ini maka dilakukanlah pembaharuan secara mendasar mengenai tujuan perusahaan dengan puncaknya adalah pengadossian oleh RMBCA.

Selain dari pencantuman tujuan yang umum, akta pendirian perusahaan acap kali juga mencantumkan tujuan yang labih spesifik sebagai bagian dari planning perusahaan yang bersifat internal. Namun hal ini dikhawatirkan juga akan lebih menimbulkan kesulitan daripada manfaat.

Beberapa konsultan hukum / pengacara yang mencantumkan tujuan detail perusahaan juga mencantumkan "juga akan bergerak di bidang usaha yang sah menurut hukum lainnya".Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pembacanya mengenai perusahaan tanpa mengurangi kebebasan bergerak dari perusahaan. Tujuan lain adalah untuk mengantisipasi peraturan Federal ataupun peraturan negara bagian yang mensyaratkan perusahaan dapat beroperasi untuk tujuan - tujuan khusus tertentu.

Tujuan perusahaan harus dibedakan atas hak perusahaan. Disetiap peraturan hukum perusahaan negara bagian pasti mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap perusahaan secara otomatis. Kebanyakan negara bagian mencantumkan daftar yang luas dan tidak bersifat khusus. RMBCA dengan tetap memakai prinsip-prinsip dasar tradisional menambahkan dalam pasal 3.02 bahwa perusahaan mempunyai hak untuk melakukan tindakan sebagaimana layaknya pribadi untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan usaha dan kehidupan perusahaan. Sebagai contoh adalah hak untuk melakukan pembayaran, untuk memberikan sumbangan (donasi) dan hal-hal lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan dan usaha perusahaan. Perusahaan dengan tujuan yang terbatas tetap memiliki hak yang luas. Jika suatu peraturan hukum perusahaan suatu negara bagian mencantumkan hak-hak secara luas dan terinci , maka tidak

perlu untuk mencantumkan dalam akta pendirian perusahaan hak-hak perusahaan secara terinci pula, karena hal itu akan menimbulkan salah penafsiran. Karena berdasarkan pengalaman sejarah para awam hanya mendasarkan pada hak perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Maka para penyusun harus memberikan keterangan yang jelas mengenai hak dan tujuan perusahaan. Suatu pasal yang memperbolehkan perusahaan untuk bergabung dengan suatu patnership atau joint-venture adalah membahas mengenai hak perusahaan bukan tujuan perusahaan.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : PERMODALAN

Akta pendirian perusahaan juga harus mencantumkan mengenai jenis-jenis saham perusahaan yang akan diterbitkan. Informasi yang harus diberikan oleh perusahaan adalah mengenai saham-saham perusahaan berhubungan dengan aham-saham yang berhak diterbitkan tidak mengenai saham-saham yang direncanakan akan diterbitkan. Namun beberapa negara bagian juga mensyaratkan pencantuman saham-saham yang akan diterbitkan, hubungannya dengan prinsip keterbukaan dan informasi bagi umum.

Jumlah modal minimum yang disyaratkan oleh peraturan negara-negara bagian adalah hampir mirip selama 25 tahun. Perusahaan dilarang untuk beroperasi jika tidak dapat memenuhi syarat minimum modal dan direktur perusahaan harus

bertanggung jawab secara pribadi jika perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat modal dasar minimum. Jumlah yang lazim dipergunakan adalah \$1.000, beberapa negara bagian mensyaratkan \$500 atau jumlah lain dan juga mensyaratkan minimal presentase modal.

Saat ini hampir semua negara bagian menghapuskan kebijaksanaan, berdasarkan teori bahwa setiap jumlah minimum modal adalah hal yang sewenang-wenang dan tidak memberikan perlindungan kepada pihak ketiga selaku kreditur. Masalah utama dari jumlah minimal modal yang ditentukan adalah tidak diperhitungkannya jumlah modal yang diperlukan sebenarnya oleh suatu perusahaan berkaitan dengan usahanya. Masalah lain adalah inflasi nilai mata uang (dollar Amerika).

Jadi saat ini dengan RMBCA dimungkinkan suatu perusahaan didirikan dengan modal dasar hanya 1 sen.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : KANTOR TERDAFTAR DAN PETUGAS TERDAFTAR

Setiap perusahaan harus memiliki suatu kantor yang terdaftar dan petugas dari kantor tersebut yang terdaftar. Kantor tersebut dapat juga merupakan tempat dimana usaha-usaha operasional perusahaan dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian dimana harus menghubungi dan siapa yang harus dihubungi jika ada hal-hal penting khususnya masalah legalitas / hukum yang berhubungan dengan

perusahaan. Tujuan lain adalah untuk mempermudah penyampaian surat-surat perpajakan dan surat-surat dari pemerintah negara bagian. Kantor dan petugas yang terdaftar tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam akta pendirian perusahaan., jika ada perubahan juga harus dilaporkan kepada Sekretaris Negara Bagian.

Kadangkala perusahaan mencantumkan pusat bisnisnya sebagai kantor yang terdaftar. Dalam beberapa kasus yang menjadi petugas terdaftar adalah karyawan atau pengurus perusahaan, namun kerugiannya adalah surat pemberitahuan, dokumen-dokumen hukum dan surat-surat resmi lain tercampur dengan surat-surat bisnis yang lain dan luput dari perhatian. Maka para konsultan hukum / pengacara menyarankan untuk memakai kantor mereka sebagai kantor terdaftar perusahaan dan mereka sebagai petugas perusahaan.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN : DEWAN DIREKSI

Jika peraturan negara bagian mensyaratkan bahwa pendiri perusahaan yang harus melengkapi perusahaan maka tidak ada keharusan untuk mencantumkan nama anggota dewan direksi. Jadi tujuan pencantuman nama anggota dewan direksi adalah untuk memperjelas siapa yang bertugas untuk melengkapi organisasi perusahaan.

Tidak ada keharusan bahwa penggantian anggota dewan direksi harus diikuti dengan perubahan akta pendirian

perusahaan atau harus dilaporkan kepada Sekretaris Negara Bagian, karena arsip yang disimpan oleh Sekretaris Negara Bagian tidak termasuk arsip mengenai dewan direksi.

Jika nama anggota dewan direksi dicantumkan maka mereka bertugas sampai rapat umum pemegang saham pertama dilakukan atau sampai saat dipilihnya dewan direksi yang baru. Rapat umum pemegang saham yang pertama dapat dilakukan segera setelah dewan direksi melakukan rapat untuk mengorganisasikan perusahaan. .

Berbeda dengan pendiri perusahaan, direktur dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh atau sebagian tindakannya. Jadi tidaklah bijaksana jika seorang konsultan hukum / pengacara bertindak selaku direktur.

PENYEMPURNAAN ORGANISASI PERUSAHAAN : UMUM

Seorang pengacara masih memiliki tugas lain setelah menyiapkan akta pendirian dan melakukan pendaftaran yaitu melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan operasional perusahaan pada awal pendirian, antara lain :

1. Mempersiapkan anggaran dasar PT
2. Mempersiapkan undangan rapat Dewan Direksi, notulen rapat dan syarat pelepasan tuntutan
3. Memesan cap perusahaan dan buku notulen
4. Memesan sertifikat saham kosong atas nama perusahaan , merancang pencetakannya dan mengecek penerbitannya

5. Mempersiapkan pembukaan giro bank atas nama perusahaan
6. Mempersiapkan undangan untuk rapat umum pemegang saham, buku notulen untuk rapat dan jika diperlukan syarat-syarat pembebasan tuntutan
7. Mempersiapkan kontrak untuk karyawan, voting trust, persetujuan pooling saham, pembatasan pengalihan saham, dan hal-hal lain yang memerlukan perjanjian khusus sehubungan dengan saham perusahaan
8. Memesan nomer wajib pajak

SIFAT DASAR DAN TUJUAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Anggaran dasar perusahaan berisi hal-hal yang mengatur urusan intern perusahaan . Dibuat oleh perusahaan dan hanya mengikat ke dalam perusahaan. Dapat dikatakan sebagai kontrak antara perusahaan dan individu-individu didalamnya atau kontrak antar individu dalam perusahaan. Anggaran dasar PT tidak didaftarkan ke Sekretaris Negara Bagian. Sifatnya dapat diubah. Jika timbul konflik antara anggaran dasar perusahaan dan akta pendirian perusahaan maka yang dipakai adalah akta pendirian perusahaan. hal-hal yang menyangkut urusan dalam dan operasional perusahaan lebih banyak dicantumkan didalam anggaran dasar dan termasuk pula pengulangan isi akta pendirian perusahaan.

CAP PERUSAHAAN

Di beberapa negara bagian cap perusahaan tidak lagi diperlukan. Suatu tandatangan di atas kertas fax sudah memiliki aspek hukum sebagai cap. Cap perusahaan diperlukan untuk membedakan antara transaksi perusahaan dan transaksi pribadi. Cap perusahaan juga melekat didalam sertifikat saham, obligasi, bukti hutang, bukti kepemilikan tanah oleh perusahaan, notulen resmi rapat dan kontrak-kontrak perusahaan yang penting.

RAPAT ORGANISASI

Hal-hal yang penting berkaitan dengan operasional awal perusahaan biasanya dibahas didalam rapat organisasi perusahaan yang dilakukan oleh para direktur atau bisa juga oleh pendiri perusahaan. Dalam rapat dibahas mengenai penerimaan investor, penerimaan kontrak, penerbitan saham, pemilihan pengurus, persetujuan kontrak, persetujuan hutang piutang dan lain-lain.

Seorang konsultan hukum / pengacara biasanya adalah pihak yang mempersiapkan rancangan notulen rapat, baik rapat dewan direksi maupun rapat pemegang saham.

Tidak ada bentuk yang khusus mengenai rapat organisasi ini. Jika tidak ada yang mau disebutkan namanya dalam daftar dewan direksi maka pengacara harus mempersiapkan rapat umum pemegang saham untuk kemudian memilih anggota dewan direksi,

baru kemudian bisa mempersiapkan rapat dewan direksi untuk menentukan operasional PT. Dalam kondisi seperti ini maka peran pendiri perusahaan sangatlah penting.

KESIMPULAN

Demikianlah hal-hal penting yang mempengaruhi proses pendirian suatu perusahaan di Amerika Serikat. Proses-proses yang harus dilalui demikian mudah dan tidak rumit, dengan pertimbangan untuk memberikan suatu kondisi yang positif pada proses tumbuh dan berkembangnya ekonomi suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Robert.W.Hamilton, The Law of Corporations, in a nutshell, West Publishing Co., 1996
2. Rochmat Sumitro, Hukum Perseroan Terbatas , Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993
3. Winardi, Kapita Selekta Ekonomi Perusahaan, Nova, Bandung, 1989